

KAJIAN HISTORIS SENI PERTUNJUKAN BALI DAN PELUANGNYA DALAM MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Hendra Santosa

Program Studi Seni Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar
Email: hendrasnts@gmail.com, 0818556949

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap peristiwa yang melingkupi perjalanan Seni Pertunjukan Bali dalam menjawab peluang dalam memasuki era revolusi 4.0. Seni Pertunjukan Bali telah mengalami peristiwa sejarah panjang yang dimulai dari tercatatnya berita Cina abad ke-7 sampai sekarang ini. Tulisan ini menggunakan dalam penjabarannya, di samping menggunakan metode sejarah, juga menggunakan metode deskriptif analisis. Ada tonggak sejarah seni pertunjukan yang menunjukkan peran seseorang pada masa lampau yang berpikiran maju dalam membangun Seni Pertunjukan yang mungkin pada saat itu berpikiran dan tindakannya di luar kebiasaan dan mungkin tidak masuk akal jika dilakukan pada masa itu. Pada masa sekarang pikiran dan tindakan tersebut telah menjelma menjadi pariwisata 3.0. Sekiranya tindakan dan pemikiran seperti itu dapat ditularkan untuk meraih peluang dalam memasuki era industri 4.0 bagi seni pertunjukan tradisional Bali.

kata kunci : tonggak sejarah, seni pertunjukan, revolusi dan peluang.

Pendahuluan

Pertama berita Cina tentang Bali. Kehidupan manusia Bali telah melampaui dan mengalami berbagai peristiwa sejarah yang membentuk karakter kehidupan seperti yang sekarang berkembang dengan berlandaskan agama Hindu (Siwa-Buda) dan berbagai peninggalan sejarah membuktikan hal tersebut. Temuan artefak *teracota* yang bertuliskan pujian-pujian menunjukkan bahwa Bali sudah mulai memasuki sejarahnya dari tahun 778 M sejenis dengan tulisan yang ada di candi Kalasan Jawa Tengah, mungkin saja sejaman dan berkaitan dengannya karena beberapa artefak peninggalan agama Budha seperti candi-candi yang ada di Bedugul dan Tampaksiring. Tidak ada salahnya jika beberapa seni pertunjukan yang ada di Bali pada saat itu dapat dilihat dari relief-relief yang ada di Candi Borobudur seperti seni pertunjukan Banjuran.

Tonggak sejarah kedua dimulai dengan sebuah prasasti Blanjong pada 913 M yang menyebutkan bahwa segenap pulau Bali dalam lidungan Budha dan menyebutkan seseorang yang bergelar Samasta Samantadhipatih Sri Kesari Warmadewa. Kekuasaan dinasti Warmadewa berlangsung dari tahun 913 M sampai 1022 M. Berakhirnya kekuasaan dinasti Warmadewa ini dengan ditemukannya prasasti Baturan, Bila, Tengkulak A, dan prasasti Buwahan yang menyebut nama raja Marakata pada 944 S (1022 M), maka dimulailah masa pemerintahan dinasti Isyana atau Mpu Sindok di Bali sampai pemerintahan Raja Paduka Bhatara Sri Asta Asura Ratna Bumi Banten yang dikalahkan Majapahit pada 1265 S (1343 M).

Hal terpenting adalah diketahuinya sistem religi pada zaman Bali Kuna adalah gagasan mengenai keagamaan yang menyangkut keyakinan tentang konsepsi ketuhanan, aktivitas ritual dan pelaksanaan peribadatan, dan adanya sarana dan peralatan fisik tempat pemujaan. Sebelum para brahmana datang ke Bali, penduduk telah menganut kepercayaan animisme dengan upacara kematian yang dilakukan dengan cara dikubur, diletakan saja, dan juga dengan cara dibakar atau ngaben. Pada masa Bali Kuna dikenal jabatan mpuku Sewasogata (Siwa-Budha).

Tonggak sejarah ketiga adalah ditaklukkannya Bali oleh Majapahit, mengubah sistem penulisan yang semula dilakukan dengan media batu dan logam, berubah menjadi sistem penulisan pada daun lontar. Kemudian juga telah menjadikan Bali sebagai miniatur dari Majapahit karena sedikit banyak dipercaya bahwa Bali telah menyerap sistem pemerintahan, kehidupan, dan keagamaan yang telah berkembang di Majapahit. Sistem kasta diberlakukan dengan istilah *triwangsa* dan *jaba*, seperti yang berpengaruh pada perlakuan dan kehidupan sosial di Bali terbukti dari pemberlakuan upacara peribadatan bagi golongan *triwangsa* berlainan dengan golongan *jaba*. Hal ini tentu saja menimbulkan perlawanan-perlawanan yang tidak terlihat

seperti upacara *ngaben bea tanam*, yang artinya upacara penguburan, atau upacara Megeret Pandan dan Gebug Ende di daerah Karangasem yang penulis percaya sebagai latihan beladiri.

Pada zaman Bali Madya ini telah terjadi perebutan kekuasaan dan pengetahuan antara Bali dan Mataram. Berbagai fakta mental dan faktual menunjukkan bahwa perebutan tersebut memang benar dan terjadi. Fakta mental berupa perkataan tentang *nak Jawa* dan lain-lainnya mengungkapkan telah terjadinya perasaan sakit hati yang mendalam seperti halnya orang Sunda yang menyebut *Jawa koek*. Dalam fakta faktual adalah adanya nama kota-kota yang di Jawa Timur, maka pada kedua pulau tersebut juga ada seperti Kediri. Peristiwa penyerangan (*nglurug bang wetan*) telah menimbulkan migrasi besar-besaran dari daerah Jawa Timur ke Bali sampai dengan Lombok. Tentu saja hal ini berimbas pada berbagai bidang kehidupan karena yang bermigrasi adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dan pengetahuan tertentu sebagai salah satu bagian yang menjadikan Bali berkembang seperti saat ini. Seperti yang (Kartodirdjo 1982: 165) ungkapkan bahwa dalam perang-perang selama zaman Mataram, banyak keluarga-keluarga bangsawan daerah keturunan *anden* atau *akuwu* Majapahit ataupun kepala *mandala* yang mungkin runtuh kemudian hijrah ke Bali dan memperkuat budaya Bali sampai saat ini.

Tonggak keempat adalah kontak pertemuan dengan bangsa Eropa. Walaupun terasa pahit, penaklukan Bali oleh Belanda melalui perang puputan telah membawa sebuah peradaban yang menghapuskan upacara *mesatya* para *bela* pada upacara *ngaben* yang dianggap oleh orang Eropa adalah sebagai sebuah tindakan barbar. Belanda memberlakukan kebijakan politik etis sekaligus juga politik Baliseering dua hal yang sangat bertentangan dengan politik etis yang ingin menguasai Bali melalui golongan *triwangsa*, namun di sisi lain Belanda ingin meneguhkan konsep romantisme *utopia*. Pemerintahan Kolonial Belanda dalam politik kebudayaan Baliseering atau pemuliaan kebudayaan Bali telah berimbas pada konsep-konsep lainnya seperti konsep sosial, pendidikan, pariwisata budaya, dan konsep pembangunan yang berwawasan budaya Bali. Penulis meyakini bahwa hal ini merupakan tonggak kebangkitan kesenian menjadi sebuah seni pertunjukan pariwisata dengan meninggalkan kesakralannya atau sebuah tiruan dari aslinya. Bagaimana kemudian perubahan pembinaan kesenian dari di bawah pembinaan istana menjadi pembinaan langsung oleh masyarakat telah membawa perkembangan kesenian ke arah kemajuan yang pesat dan membanggakan di beberapa wilayah kabupaten di Bali. Tentunya perubahan pembinaan ini membawa perubahan terhadap arah konsep *due* (kepunyaan), di mana sebuah kesenian yang biasanya dipertunjukkan untuk kalangan puri berubah menjadi pertunjukan di pura. Pada masa ini telah terjadi pergeseran cara pandang kehidupan orang Bali dari yang bersifat *ayah-ayahan* (Windia, 2018), menjadi kesenian yang merupakan presentasi estetis.

Tonggak sejarah yang keempat adalah masuknya Bali dalam tatanan kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan azas Pancasila. Maka Bali secara perlahan melebur dalam segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena sudah menjadi bagian dari Indonesia. Sistem pembinaan pendidikan kesenian telah berubah dari sistem keluarga penunjang kelangsungan puri atau sanggar berkembang menjadi pendidikan formal kesenian seperti Kokar atau ASTI.

Politik Kebudayaan Baliseering

Kebijakan dalam mempertahankan budaya Bali dilakukan melalui jalur pendidikan. Salah satu penganut orientalis yang bernama H.De Fliedhaer mengembangkan politik kebudayaan yang dikenal dengan nama *Balinisering* atau *Baliseering* artinya “Pembalian terhadap Bali” kembali dengan cara penyesuaian pendidikan pribumi di Bali dengan latar belakang kebudayaan Bali (Ardika, 2015:493). Ardika menjelaskan bahwa Balinisering adalah politik kebudayaan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam upaya mengekalkan kekuasaannya atas pulau Bali (Ardika, 2015: 489). Memang secara sempit Balinisering menguntungkan Bali sendiri karena dalam program Baliseering kebudayaan Bali dapat dikembangkan. Tetapi apabila dipandang lebih jauh Baliseering merupakan alat Belanda untuk memecah belah Bali dari Indonesia (Budiastra, 1978: 129).

Balinisering yaitu hubungan yang berdekatan antara pendidikan dengan budaya asli, yang sebelum perang adalah kebanggaan dan kemuliaan tercerahkan antara kebijakan pendidikan (Hoeve, 1948: 131). Percaturan politik kolonial yang terjadi awal abad ke-19 menunjuk-

kan persaingan yang sangat sengit dalam memperebutkan pengaruh atas negeri jajahan. Oleh karenanya pemerintah Belanda mengadakan pendekatan dengan raja-raja Bali dan berhasil membuat kontrak politik yang dalam perkembangannya menimbulkan konflik karena menafsirkan yang berbeda dari kedua belah pihak (Ardika, 2015: 491).

Pada 1927 di Klungkung Johanna Catharina Adriana Lichtenbelt (1884-1979) berkeinginan mendirikan Hollands Inlandse School/HIS (Sekolah Belanda untuk Pribumi) dengan dasar Bali. Setelah pensiun (1935), Ia meneruskan pekerjaannya dengan mendirikan sekolah di Bali yang murid-muridnya dididik dengan menghormati kebudayaannya sendiri. Nyonya Lichtenbelt menganjurkan modernisasi yang berangsur-angsur di pulau itu agar dengan cara itu “*een bandjir van vreemde invloeden te voorkomen, welke het oude cultuurbezit zou kunnen verwoesten*” artinya: dapat mencegah banjir pengaruh asing, yang bisa merusak kebudayaan tua yang dimiliki (Anrooij, 2009: 137). Anrooij mencatat bahwa setelah perang puputan, ternyata pemerintah kolonial Belanda disibukan dengan program Balinisering sebagai penebus dosa, yang tentunya mendapat tekanan dari luar negeri. Selanjutnya terungkap bahwa Belanda juga sedang kesulitan keuangan dan tidak ada animo pihak swasta.

Pada 1915 didirikan Bali Instituut yang direktornya G.P. Raoufer, memberikan gambaran singkat tentang sikap administrasi kolonial dalam rangka tugas penguasa kolonial berdasarkan paternalisme yang cerdas seperti berikut. “Biarlah orang Bali meneruskan pola kehidupan pribumi mereka yang indah, bebas dari gangguan apapun! Pertanian mereka, kehidupan pedesaan mereka, aneka bentuk pemujaan, kesenian religius, dan kesusastraan mereka, semuanya menunjukkan suatu kebudayaan pribumi yang amat lentur dan kaya. Maka janganlah dibangun jalur kereta api di Bali. Biarkanlah administrasi kolonial, dengan dukungan kuat pemerintah Belanda, memperlakukan Bali sebagai suatu permata langka yang wajib dilindungi dan yang keperawanannya harus dijaga utuh” (Picard, 1992: 27; Robinson, 1995: 41).

Robinson menyebutkan bahwa sebagai kebijakan kultural, Baliseering menghasilkan ditampilkannya kembali gaya busana, arsitektural, tarian, dan tatakrama berbicara “tradisional. Menurut pihak berwenang Belanda, keluar dari penanda tersebut, dianggap sebagai tindakan subversif. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai tindakan perlawanan yang kurang ajar dan bisa dihukum di *Raad van Kerta* (Robinson, 2006: 75).

Covarubias secara gamblang mengungkapkan bahwa: “Pulau kecil terpencil ini baru menjadi berita di dunia Barat setelah beberapa tahun yang lalu muncul melalui serangkaian film dokumenter mengenai Bali dengan menekankan pada daya tarik seksualitas dengan penggambaran gadis Bali yang mempunyai tubuh elok yang pendukungnyamenampilkan komedi musikal semacam kehidupan penuh keganjilan dan ritus yang indah. Judul film tersebut *Goena-goena* istilah untuk magi, pada saat itu menjadi daya pikat seks bagi orang New York. “Sorga terakhir” (Covarrubias, 2013: 440-441; Picard, 1992: 42). Menilik pernyataan Covarubias, Belanda sepertinya ingin mengembalikan masa-masa kejayaan Bali jaman dahulu melalui sebuah pemikiran romantis masa lalu, atau mungkin Belanda melihat telah ada beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan budaya seperti dalam upacara ngaben yang melibatkan *bela* sehingga perlu memperbaikinya. Tentu saja hal ini bersifat dugaan dan perlu penelitian yang lebih dalam lagi. Walaupun demikian, keinginan untuk menerapkan Bali sebagai “museum hidup” dan peningkatan aktivitas berkesenian mengingatkan kembali akan berbagai prasasti masa Bali Kuna yang menyangkut berkesenian. Berbagai seni pertunjukkan yang pada awalnya dipentaskan di Puri seperti berbagai tari Baris telah menjelma menjadi tarian yang dipertunjukkan di pelataran pura di berbagai pelosok desa. Tari-tarian yang berdurasi panjang, dirubah menyesuaikan kepentingan pariwisata karena wisatawan mempunyai waktu yang pendek berada di Bali.

Pada sebuah seminar seri sastra, sosial dan budaya FSB Unud, I Nyoman Wijaya seorang sejarawan Program studi Sejarah mengungkapkan bahwa: “Pembelaan mati-matian terhadap budaya Bali adalah sikap setengah hati para peneliti asing, di tengah-tengah ketidakmampuan peneliti untuk menjelaskan kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap Bali pasca pembantaian missal 1906 dan 1908, yakni melarang masuknya Islam-Kristen, melarang pembukaan industri perkebunan tebu, dan pembangunan rel kereta api. Dikesankan budaya adalah makhluk suci yang perlu diselamatkan dan dilindungi. Ketika ketakutan hilang, orang-orang Bali akan melawan pemerintah. Inilah yang belum mau diungkapkan oleh peneliti asing” (<http://www.balisaja.com/2016/01/politik-identitas-orang-bali-baru.html>, diak-

ses 25 Februari 2016 jam 11.21 WIB). Pandangan Wijaya menyuratkan bahwa ada maksud lain dari penerapan Balinisering. Peneliti beranggapan bahwa maksud yang tersembunyi itu adalah perolehan keuntungan dari budaya Bali melalui pariwisata. Sungguhpun demikian, apa yang dilakukan Belanda pada masa itu, sebenarnya dampak besarnya telah dirasakan pada masa sekarang. Industri pariwisata yang saat ini berkembang, merupakan buah hasil tanaman yang dahulu ditanam oleh Pemerintahan Kolonial Belanda, mau tidak mau kita harus mengakuinya.

Berdasarkan notulen konferensi administratif September 1910, Colletive Korn, no. 166. *Koninklijk voor Taal, Land, en Volkenkunde* (KITLV), pada 1910, diambil keputusan resmi bahwa untuk menjunjung konsep kasta, sebagai pondasi prinsipil masyarakat Bali. Korn menyebutkan bahwa “Triwangsa diberi tempat yang lebih penting dan sangat jauh melampaui para raja dan teks-teks hukum tempo dulu.” Selanjutnya “menjelang pada 1920-an tanda-tanda perlawanan dari kaum Sudra yang terdidik, ditandai dengan bermunculannya perlawanan melalui koran Suryakanta dan dibalas oleh koran Bali Adnyana yang mendukung kaum Triwangsa” (Robinson, 1995: 51). Dualisme kebijakan politik yang dilakukan Belanda, disatu sisi melakukan politik etis untuk benar-benar menguasai Bali namun disisi yang lain dengan memanfaatkan sistem pelapisan masyarakat, minimal dapat melaksanakan program kerja paksa. Sungguhpun demikian, seperti politik ini ditentang karena sebanyak 85% penduduk Bali adalah *jaba wangsa* (Wingarta, 2012: 258).

Sekolah pertama yang didirikan pemerintah Belanda di Bali adalah *Tweede Klasse School* pada 1875 yang berlokasi di Singaraja. Hal ini berkaitan dengan dijadikannya Singaraja menjadi Ibukota keresidenan Bali dan Lombok pada 1882 (Ardika, 2015: 226). Setelah Belanda menguasai secara keseluruhan barulah diadakan penataan administrasi pemerintahan dan pembangunan sekolah-sekolah. Pada 914 dibuka sekolah untuk pribumi *Tweede Klasse School* di berbagai daerah di Bali Utara. Pada tahun yang sama, untuk mendapatkan tenaga terdidik profesional dan bisa berbahasa Belanda, didirikan *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) di Singaraja, di Denpasar HIS didirikan pada 1918, dan di Klungkung pada 1929 (Ardika, 2015: 469-471).

Pada awalnya Belanda memberikan prioritas pendidikan pada golongan *triwangsa* sedangkan golongan *jaba* kurang mendapat perhatian. Dalam realitanya di lingkungan masyarakat Bali masih terikat dengan *tata lokacara* yaitu aturan yang harus dituruti oleh kedua golongan yang berkaitan dengan adat istiadat maupun pergaulan sehari-hari. Golongan *triwangsa* tidak dapat menerima sepenuhnya kebijakan Belanda karena *triwangsa* masih fanatik berpandangan terhadap adat-istiadat yang berlaku (Ardika, 2015: 470). Berdasarkan berbagai keterangan tentang Bali Utara di atas, maka jelaslah bahwa pola pikir masyarakat Bali Utara sudah mulai berkembang menuju kepada apa yang terjadi selanjutnya dalam tindakan berkeseniannya, terutama dalam berkarawitan. Hal ini berkaitan dengan apa yang dilihat, dirasakan, dan yang dikerjakannya terutama yang bersentuhan dengan dunia luar (Belanda) sangat berbekas dalam kegiatan berkeseniannya.

Pariwisata Budaya

Dibalik alasan melestarikan budaya Bali dan Agama Hindu, rupanya kelompok orientalis juga memikirkan bahwa perkembangan pariwisata akan memberikan keuntungan besar bagi pemerintah dan kaum pengusaha Belanda di Hindia Belanda. Oleh karena itu mempertahankan Bali sebagai “museum hidup”, kebudayaan yang hidup dalam praktek kehidupan, harus diupayakan dengan segala cara karena merupakan aset pariwisata yang potensial (Ardika, 2015: 492).

Belanda membuka biro wisata di Batavia *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) untuk mempromosikan Hindia Belanda sebagai tujuan wisata pada 1888. Kemudian Diperpanjang jangkauannya ke Bali pada 1914. Pada 1920- an tampak ada upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata dibuktikan dengan dibukanya kantor cabang perusahaan *Nederlandsche Handed Maatschappij* (NHM) di Benoa Badung, dan perusahaan *Koninklijke Luchtvaart Maatschappij* (KLM) dan pembangunan Kuta Beach Hotel (Tantri, 1965: 60-68).

Pada 1927 dibangunlah Bali Hotel oleh Belanda sebagai hotel mewah pertama di Pulau Dewata dan mulai beroperasi pada 1928. Seiring dengan dibukanya Bali Hotel di Denpasar, ternyata berkontribusi pada seni pertunjukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan I

Gede Yudhartha pada 28 Januari 2017 di Jalan Cekomaria Denpasar, mengungkapkan bahwa “Sekaa Gong Sadmerta, Belaluan menandatangani kontrak untuk pementasan dengan Bali Hotel sampai dengan 1980.” Sungguhpun demikian, sangat disayangkan ketika ditanya tentang dokumen kontraknya, dikatakan entah berada di mana. Dengan terbukanya penunjang pariwisata berupa seni pertunjukan, berimbas pula pada perhatian Belanda pada pelestarian kesenian Bali dengan mempertahankan sistem pewarisan seni diperlukan untuk menunjang pariwisata.

Berbeda dengan Belanda yang berusaha untuk menjauhkan Bali dari pengaruh modernitas Barat, para nasionalis Bali justru berusaha menyebarkan ke kalangan rakyat segi-segi positif dan kemajuan zaman pendidikan. Salah satu tindakan itu adalah larangan buat kaum perempuan bertelanjang dada di depan umum dan larangan buat wisatawan memotret mereka dalam keadaan seperti itu. Terdorong oleh semangat moral dan tata krama, pemerintah kolonial Belanda, jauh sebelumnya telah menyuruh perempuan Bali menutup dada di tempat-tempat umum, namun hanya bisa dilaksanakan di Singaraja dan Denpasar. Pada 1939, kaum nasionalis sudah meminta pemerintah Hindia Belanda untuk melarang wisatawan memotret dada perempuan Bali dan menarik brosur-brosur dan kartu pos bergambar perempuan Bali bertelanjang dada (Picard, 1992: 57-59).

Ubud Dan Pariwisata Budaya

Para peneliti terdahulu sudah membuat tulisan mengenai gamelan Bali, misalnya dalam majalah *Djawa* nomor 3 september 1922 yang berjudul *Over Balische Muziek*, yang berdiskusi tentang musik Bali dengan Bupati Gianjar, Dewa Agung Ngoerah, dan Tjokorda Gde Rake Soekawati, *Punggawa* dari Oeboed, serta Tjokorda Soesjah di Puri ayahnya Mantja Batu Boelan, dengan perantaraan penerjemah. Walaupun tidak ada tulisan tentang gamelan pe-rang, tulisan ini merupakan tulisan pertama yang cukup komprehensif mengenai gamelan Bali. Kemudian buku yang berjudul, *Studien Over Javaansche en Andere Indonesische Muziek, De Toonkunst van Bali (Beschouwingen over Oorsprong en Beinvloeding, composities, Notenschrift en instrumen)* karya J. Kunst, dan C.J.A. Kunst van Wely pada 1925.

Pariwisata budaya pada masa pendudukan Jepang pun melakukan berbagai upaya untuk menggairahkan budaya Bali dengan cara menganugrahkan penghargaan dan pujian kepada para seniman unggul diberbagai bidang. Sungguhpun demikian, jika Belanda bertujuan untuk menjaga budaya dan masyarakat Bali dari pengaruh luar, Jepang justru terang-terangan berbicara soal memajukan dan mengembangkan budaya Bali agar bisa didayagunakan demi kepentingan Asia Timur Raya (Robinson, 1995: 125).

Pada 1943, Jepang mendirikan berbagai lembaga yang bertujuan menggalakan dan memajukan kebudayaan Bali seperti Masyarakat Penelitian Kebudayaan Bali (*Bali Cultural Research Society*) dibentuk di Singaraja dengan tujuan untuk memberikan manfaat budaya yang sehat kepada warga pulau Bali. Museum Rujukan Asosiasi Kebudayaan Bali (*Balinese Cultural Association Reference Museum*) didirikan pada 1944 dengan tujuan melestarikan budaya Bali. dan Masyarakat Penggalakan Kebudayaan Spirit Bali (*Bali Spirit Cultural Promotion Society*) yang didirikan pada akhir pada 1944 bukan saja untuk penelitian tentang sastra, seni patung, dan seni lukis, tetapi juga tentang sandang, pangan, dan papan. Pada 1944 Jepang menggarap sebuah lakon dan dipertunjukan keliling pulau Bali dengan iringan orkestra Bali yang tampilannya mencakup penggambaran warga yang bergotong-royong dalam produksi yang meningkat dan dibidang pembangunan (Robinson, 1995:126-128). Penguasaan Jepang terhadap Bali, telah menghentikan secara mendadak promosi wisata Bali tetapi perang tidak menghentikan pariwisata sama sekali, Bali dijadikan tempat berlibur perwira-perwira Jepang (Picard, 1992: 55-56).

Bali sebagai tujuan wisata unggulan di Indonesia karena memiliki berbagai potensi kebudayaan. Keunikan budaya Bali dan keindahan alam Bali, juga tampaknya menjadi daya tarik yang paling dominan dalam perkembangan kepariwisataan di Bali. Pariwisata adalah salah satu fenomena kebudayaan global yang dipandang sebagai suatu sistem, dan pariwisata budaya yang dikembangkan di Bali tampaknya selaras dengan kecenderungan pariwisata global yang terus berkembang mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat (Ardika, 2007: 28-29). Oleh karenanya, Bali mengembangkan pariwisata berdasarkan kebijakan Pariwisata Budaya yang dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 1974, ke-

mudian direvisi menjadi Perda Nomor 3 Tahun 1991 yang intinya bahwa Bali mengembangkan daerahnya berdasarkan visi pembangunan berwawasan budaya dan oleh sebab itu setiap upaya industrialisasi pariwisatanya harus dilandasi oleh kebudayaan Bali sehingga akan nampak bahwa industri pariwisata tersebut adaptif dan kreatif.

Pariwisata budaya di Bali, tidaklah lepas dari nama Tjokorda Gde Raka Soekawati dan Tjokorda Gde Agung Sukawati. Bagaimana sepak terjang keduanya dalam memajukan awal berkembangnya pariwisata di Bali. Beliau merupakan tokoh-tokoh Puri Ubud yang telah terbukti memiliki kepeloporan dan pengabdian dalam mengedepankan wawasan multikultur, kearifan lokal, kreativitas seni budaya, dan keragaman panorama alam Bali bagi pentas dunia. Dalam memperkenalkan keindahan Bali terutama Ubud, selaras dengan konsep Marketing 3.0. Dimana bisnis pariwisata di Ubud tidak hanya melulu soal keuntungan, namun lebih dari itu juga berlandaskan humanisme dan peka terhadap alam sekitar. Bila kita sering mendengar istilah '*Taksu Tri Hita Karana*' yakni ajaran dimana kita harus menyatukan kecerdasan fisik, alam, dan emosional, saat memperkenalkan Bali kepada teman-temannya (Sari, 2015).

Sebenarnya ada sesuatu hal dibalik peristiwa terjadinya pariwisata budaya yang dilakukan oleh keduanya adalah terjadinya sikap kompromi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Raja Buleleng, Badung, dan Klungkung jelas melakukan konfrontasi terhadap pemerintah kolonial Belanda melalui perang puputan. Dengan pelaksanaan perang puputan menandakan tugas para raja di dunia ini sudah puput atau selesai. Namun yang dilakukan oleh Tjokorda Gde Raka Soekawati dan Tjokorda Gde Agung Sukawati bertolak belakang dengan sikap-raja-raja yang melakukan puputan. Sepertinya beliau merasa bahwa tugas dan karmanya di dunia belumlah selesai. Beliau mau menerima dan berbagi hak pelayanan dari para rakyatnya dengan pemerintah Belanda (wisatawan). Inilah sekiranya pemikiran *out of the box* yang dilakukan oleh beliau berdua, telah berdampak sangat besar sampai sekarang. Beliau telah mengembangkan inkubator dan laboratorium seni bagi provinsi Bali. Dampak laboratorium dan inkubator kesenian itu dapat dirasakan sampai sekarang dengan dihasilkannya juara-juara lomba Pesta Kesenian Bali yang direbut oleh Gianyar, Badung, dan Denpasar. Sudah selayaknya beliau berdua diberikan tanda jasa pahlawan nasional dalam bidang pariwisata budaya.

Perkembangan Revolusi Industri

Revolusi Industri adalah merupakan perkembangan peradaban kebudayaan manusia yang berkaitan dengan pengembangan teknologi mulai dari revolusi Industri 1.0, 2.0, 3.0 dan terakhir revolusi industri 4.0. Revolusi industri 1.0 dimulai dengan ditemukannya mesin uap yang ditemukan oleh James Watt sebagai penggerak mekanik. Karena penemuannya pada abad 18 ini, maka James Watt hidup disebut sebagai bapak revolusi Industri. Mekanik digerakan dengan panas yang dihasilkan melalui pembakaran air menjadi tenaga uap yang menggerakan piston. Industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia (Muhamad, 2018). Sampai saat ini hasil-hasil dari revolusi industri 1.0 masih dipergunakan seiring dengan penemuan bahan bakar minyak dari fosil maupun bahan bakar yang terbarukan.

Pada revolusi industri kedua atau 2.0 dimulai pada tahun 1900-an. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik (Debora, 2019). Industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu (Muhamad, 2018). Pada masa ini merupakan perubahan tenaga penggerak dari piston berubah menjadi dinamo listrik yang berakibat pada perubahan berbagai peralatan tukang seperti gergaji, mesin bubut, alat penghalus kayu, mesin jahit, dan lainnya sudah banyak menggunakan tenaga listrik. Pola pekerjaan yang semula menggunakan peralatan manual dengan tenaga manusia telah banyak berganti dengan menggunakan tenaga listrik dengan penggerak dinamo. Seperti halnya yang sedang banyak dibicarakan adalah berpindahnya mobil dari yang berbahan bakar minyak digantikan dengan tenaga listrik.

Revolusi Industri 3.0 dimulai dengan penggunaan perangkat elektronik (komputer) dan teknologi informasi untuk mendorong produksi, yang ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya biaya produksi menjadi lebih murah (Syafaati,

2019). Perangkat komputer telah merubah penggunaan kertas dalam menulis menjadi format digital yang memungkinkan untuk mengubah kesalahan dalam tulisan secara digital.

Revolusi Industri 4.0 berkembang mulai tanggal 17 Januari 2018, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud) menyelenggarakan rapat kerja nasional (RAKERNAS) dengan agenda “Pengembangan IPTEK dan Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0”. Kemendikbud dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0 dimulai dengan melalui pembangunan SDM yang kreatif, dan inovatif dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi, misalnya dengan pendidikan jarak jauh dan pembelajaran secara daring atau *e-learning* (<https://www.ristekdikti.go.id/siaran-pers/pengembangan-ipitek-dan-pendidikan-tinggi-di-era-revolusi-industri-4-0/>). Penerapan *e-learning* dapat membuat sebuah proses belajar-mengajar menjadi lebih fleksibel dan memiliki kualitas yang tinggi karena dengan *e-learning* akan membentuk sebuah cyber university (Sombuntham; 2006) dengan jangkauan yang tidak terbatas yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai program studi di berbagai universitas, sehingga dapat menjangkau mahasiswa yang tak terbatas tanpa memerlukan ruang dan waktu seperti pembelajaran konvensional. Masing-masing universitas, prodi, bahkan mahasiswa dapat memanfaatkan, memilih, dan menyeleksi materi kuliah dan dosen yang mengajar sehingga mendapatkan materi yang terbaik.

Revolusi industri 4.0 menekankan pada kemampuan *Artificial Intellegent* (kecerdasan buatan) sehingga kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak (Syafaati, 2019). Transparansi informasi merupakan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital. Bantuan teknis yang meliputi; (a) kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat; (b) kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman; (c) meliputi bantuan visual dan fisik. Keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik yang ada di dunia maya dapat digunakan untuk membuat keputusan dan menjalankan tugas seefektif dan seefisien mungkin (Muhamad, 2018).

Penutup

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan agar seni pertunjukan Bali dapat mengambil peluang dalam era industri 4.0 karena yang seni pertunjukan Bali adalah seni pertunjukan yang unggul tidak terbantahkan lagi. Seni pertunjukan Bali sudah terkenal di dunia, sehingga banyak tumbuh sanggar-sanggar seni pertunjukan tradisional Bali di nusantara dan mancanegara. Seni pertunjukan tradisional Bali, telah menunjukkan perkembangan yang dinamis dan penuh kreativitas tanpa menghilangkan akarnya. Untuk menangkap peluang tersebut, diperlukan pemikiran yang maju diluar kebiasaan, memanfaatkan sistem informasi dalam mengolah data seni pertunjukan tradisional Bali, dengan demikian akan menjadi sumbangan yang sangat berharga kepada *big data* khususnya data seni pertunjukan tradisional Bali. Dengan dimilikinya *big data*, maka seni pertunjukan tradisional Bali sudah mulai memasuki salah satu tahapan dalam memanfaatkan peluang era industri 4.0. Kemudian yang paling penting adalah untuk pemangku kepentingan bahwa untuk menerapkan Revolusi Industri 4.0 dalam kegiatan Seni Pertunjukan diperlukan tindakan yang *out the box*.

Daftar Rujukan

- Anrooij, Francien van. 2009. *De Koloniale Staat, 1854-1942; Gids Voor Het Archief van Het Ministerie van Kolonien; De Indonesische Archipel*. 2014th ed. Leiden.
- Ardika, I Wayan. 2015. *Sejarah Bali Dari Prasejarah Hingga Modern*. Denpasar: Udayana University Press.
- Budiastra, Putu. 1978. *Sejarah Daerah Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Covarrubias, Miguel. 2013. *Pulau Bali Temuan Yang Menakutkan. Terjemahan Island of Bali*. Terjemahan. Denpasar: Udayana University Press.
- Debora, Yantina. 2019. “Sejarah Revolusi Industri Dari 1.0 Hingga 4.0.” *Tirto.id*. <https://tirto.id/sejarah-revolusi-industri-dari-1-0-hingga-4-0-dhhu>.

- Hoeve, Uitgeverij W. Van. 1948. *Indonesie: Twee Maandelijks Tijdschrift Gewijd Ann Het Indonesisch Culturgebeid*. Volume 2.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Muhamad, Yahya. 2018. *Era Industri 4.0: Tantangan Dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia*. Makasar. <http://eprints.unm.ac.id/6456/>.
- Picard, Michel. 1992. *Bali: Tourism Cultural et Culture Touristique*. Terjemahan. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Robinson, Geoffrey. 1995. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik (The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali)*. Terjemahan. Cornell: Cornell University Press.
- Sari, Novia. 2015. "Spirit Marketing 3.0 Dalam Diri Tjokorda Gde Agung Sukawati." *Marketeers.com*. <http://marketeers.com/spirit-marketing-3-0-dalam-diri-tjokorda-gde-agung-sukawati/>.
- Sombuntham;, Supanee. 2006. "Thailand Cyber University: The Strategic Move to Higher Education Reroem." *APRU DLI*. https://www.academia.edu/1021870/Thailand_Cyber_University_the_strategic_move_to_higher_education_reform.
- Syafaati, Ayu Diah. 2019. "Revolusi Industri Dari Generasi 1.0 Hingga 4.0." *Academu.edu*.
- Tantri, Ketut. 1965. *Revolusi Di Nusa Damai*. Djakarta: PT. Gunung Agung.
- Windia, I Ketut Sadiana; Wayan P. 2018. "Pemetaan Partisipasif Melalui Aplikasi GPS Untuk Mitigasi Konflik Batas Wilayah: Studi Kasus Di Desa Adat Nyuh Kuning, Ubud, Bali." *Kajian Bali* 8(1): 125–36.
- Wingarta, I Putu Sastra. 2012. "Jengah Dan Transformasi Nilainya." *Al-Ulum* 12(2): 355–76.